

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur)

Irene Kristianti U.L. Tobing

Universitas Negeri Surabaya, Address, Jl. Ketintang, Surabaya 60231 Indonesia
christiantirene@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

Local Own Revenues,
Balancing Funds,
Capital Expenditure
Economic Growth

ABSTRACT

Regional autonomy gives authority to Regional Government to regulate its own economic growth. It requires the Regional Government to be wiser in exploring its potential Regional Original Income. Regional Government has different financial ability, therefore the Central Government gives Balance Income to cover the discrepancies for the implementation of Regional Autonomy. Economic growth indicates the extent to which economic activity will generate additional income for society in a certain period. The indicator to measure economic growth is the value of Gross Regional Domestic Product. The aim of this study is to determine the effect of Local Own Revenues and Balancing Funds toward Economic Growth either directly or indirectly through Capital Expenditure.

This study used quantitative approach by statistic descriptive method. The data that had been used was secondary data in the form of budget realization report and economic growth report from 38 districts/ cities in East Java area in the year of 2010-2015 with 228 samples. The result of this study that Local Own Revenues had direct positive effect and significant toward Economic Growth and also indirectly had insignificant impact toward Economic Growth through Capital Expenditure, Balancing Fund directly had negative effect and significant toward Economic Growth and also indirectly had insignificant effect toward Economic Growth through Capital Expenditure, and also Capital Expenditure had negative and insignificant effect toward Economic Growth.

1. Introduction

Pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota tertulis dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi di Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Undang-undang tersebut memberikan otonomi secara utuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pembangunan ekonominya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya yang diatur dalam APBD. Kemandirian suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh dalam rangka pembiayaan pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah

daerah terhadap masyarakat dalam membantu dan memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan pendapatan asli daerah selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2010).

Hasil dari penelitian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah menyebutkan bahwa, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal utama bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana yang tercantum dalam APBD harus benar-benar digunakan untuk program dan kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sepanjang pelaksanaan otonomi daerah, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan beberapa indikator, antara lain kemandirian daerah dan rasio belanja daerah. Data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2010-2015, menunjukkan bahwa secara nasional proporsi dana perimbangan pusat ke daerah masih dominan setiap tahunnya. Lebih dari 60% APBD bersumber dari dana perimbangan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal kemandirian anggaran. Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2010-2015 memperlihatkan bahwa belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah dengan rata-rata 43,75% dan porsi belanja modal rata-rata hanya 23,92%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal yang seharusnya berpengaruh besar terhadap pembangunan justru mendapatkan porsi kecil. Padahal belanja modal dapat menjadi stimulan bergeraknya investasi swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain permasalahan tersebut, terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara berturut-turut pada tahun 2011-2015 sebesar 6,44%, 6,64%, 6,08%, 5,86%, dan 5,44%.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan belanja modal sebagai variabel intervening. Selanjutnya, masalah yang diteliti sebagai berikut: Apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal? Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal sebagai variabel intervening? Apakah dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal sebagai variabel intervening?

2. Literature Review

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut dengan peraturan daerah. Menurut Bastian (2006: 81), anggaran publik mempunyai karakteristik: anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan, anggaran umumnya menyangkut jangka waktu tertentu satu atau beberapa tahun, anggaran berisi komitmen/kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang memiliki tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemampuan daerah dalam melaksanakan sebuah pembangunan ekonomi dapat diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Menurut Boediono (1999), pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.3. Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang bagi pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Menurut Boediono (1999), dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus

2.4. Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian atau pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut Halim (2008:19), belanja modal merupakan bentuk investasi yang berupa belanja modal sebagai belanja atau biaya yang memberi manfaat selama lebih dari satu tahun. Belanja modal sebagai komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatannya aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat, tetapi ada juga yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin dalam produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha disuatu daerah dalam satu periode tertentu. Perhitungan produk domestik regional bruto menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berjalan (BPS, 2016).

3. Pengembangan Hipotesis

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat. Peningkatan pendapatan asli daerah akan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Ngurah dan Kartika (2014) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

H1: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan masih sangat signifikan sebagai sumber pembiayaan daerah, terutama untuk belanja modal. Setiap transfer dana perimbangan yang diterima daerah akan meningkatkan belanja pemerintah daerah, khususnya untuk peningkatan belanja modal. Peningkatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada umumnya masih disebabkan adanya aliran dana perimbangan yang meningkat dari pemerintah pusat ke daerah. Hasil penelitian Ferdian (2013), Puspitasari dan Indrajaya (2014) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan belanja modal. Dalam jangka pendek pemerintah daerah akan menyesuaikan pengeluaran terhadap belanja modal dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

H2: Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Peningkatan pendapatan asli daerah harus berdampak pada perekonomian daerah. Keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga dari perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian Maryati dan Endarwati (2010) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H3: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana perimbangan masih memegang peran dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Keadaan geografis dan perbedaan potensi daerah menciptakan perbedaan dalam menghasilkan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, dana perimbangan sangat vital dalam mempengaruhi perekonomian di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012) menunjukkan bahwa dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H4: Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal dalam bentuk pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah dapat berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H5: Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Semakin meningkatnya pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal pada pemerintah daerah. Belanja modal yang meningkat dalam bentuk pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah dapat berpengaruh dalam merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja modal dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

H6: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Semakin meningkatnya dana perimbangan akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal pada pemerintah daerah. Belanja modal yang meningkat dalam bentuk pembangunan sarana

prasarana dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah dapat berpengaruh dalam merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan belanja modal dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

H7: Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

4. Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel dengan menggunakan data numerik atau angka. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menjelaskan hubungan kausal dan menguji keterkaitan yang ada antara faktor-faktor pendapatan asli daerah dan dana perimbangan serta belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota dan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur tahun 2010-2015 yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi atau kabupaten/kota di Jawa Timur. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu mencari dokumen mengenai variabel yang akan diteliti. Dokumen yang dicari dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran dan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur Tahun 2010-2015.

Variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel eksogen: pendapatan asli daerah (X1) dan dana perimbangan (X2), variabel intervening: belanja modal (Y1), variabel endogen: pertumbuhan ekonomi (Y2).

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur periode Tahun 2010-2015 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 228 sampel.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan pengujian model jalur menggunakan *multiple regression analysis*, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji R², uji F, uji t, dan uji signifikansi pengaruh tidak langsung dengan menggunakan *sobel test statistic*.

5. Results and Discussion

5.1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
LnPAD	210	23,60	27,74	25,5547	,75667
LnDP	210	26,35	28,28	27,4355	,41334
LnBM	210	24,64	27,67	26,0007	,59017
LnPE	210	1,53	2,04	1,7838	,10413
Valid N (listwise)	210				

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa data diperoleh dari 210 data observasi dari data awal sebanyak 228 data dikurangi data outlier sebanyak 18 data. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa

variabel PAD (pendapatan asli daerah) memiliki nilai terkecil sebesar 23,60, nilai terbesar sebesar 27,74, *mean* sebesar 25,5547, dan standar deviasi sebesar 0,75667 yang menunjukkan variasi yang terdapat pada variabel PAD (pendapatan asli daerah). Variabel DP (dana perimbangan) memiliki nilai terkecil sebesar 26,35, nilai terbesar sebesar 28,28, *mean* sebesar 27,4355, dan standar deviasi sebesar 0,41334 yang menunjukkan variasi yang terdapat pada variabel DP (dana perimbangan). Variabel BM (belanja modal) memiliki nilai terkecil sebesar 24,64, nilai terbesar sebesar 27,67, *mean* sebesar 26,0007, dan standar deviasi sebesar 0,59017 yang menunjukkan variasi yang terdapat pada variabel BM (belanja modal). Variabel PE (pertumbuhan ekonomi) memiliki nilai terkecil sebesar 1,53, nilai terbesar sebesar 2,04, *mean* sebesar 1,7838, dan standar deviasi sebesar 0,10413 yang menunjukkan variasi yang terdapat pada variabel PE (pertumbuhan ekonomi).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	LnPAD	LnDP	LnBM	LnPE
N	210	210	210	210
Kolmogorov-Smirnov Z	,724	1,192	,529	,565
Asymp. Sig. (2-tailed)	,671	,117	,943	,907

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Hasil uji *kolmogorov-smirnov z* pada tabel 2 menunjukkan bahwa untuk LnPAD sebesar 0,724 dengan *asymp.sig.(2-tailed)* pada 0,671, nilai *kolmogorov-smirnov z* untuk LnDP sebesar 1,192 dengan *asymp.sig.(2-tailed)* pada 0,117, nilai *kolmogorov-smirnov z* untuk LnBM sebesar 0,529 dengan *asymp.sig.(2-tailed)* pada 0,943, dan nilai *kolmogorov-smirnov z* untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 0,565 dengan *asymp.sig.(2-tailed)* pada 0,907. Dengan demikian, nilai *asymp.sig.* > 0,05 berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF): Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	.Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 PAD	.340	2.943	Tidak ada multikolinearitas
DP	.337	2.965	Tidak ada multikolinearitas
BM	.299	3.350	Tidak ada multikolinearitas

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 3, nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai *tolerance* tidak ada yang kurang dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,0250

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Nilai *durbin-watson* berdasarkan pada tabel 4 diperoleh sebesar 2,0250, sedangkan dari tabel *durbin-watson*, pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel=3 dan jumlah pengamatan n=210 diperoleh nilai batas bawah (dL)=1,7451, nilai batas atas (dU)=1,8031, nilai (4-dU)=2,1969 dan nilai (4-dL)=2,2549. Dengan demikian, nilai *durbin-watson* berada diantara dL dan dU sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model linear.

Tabel 5. Hasil Uji Run-Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00237
Cases < Test Value	105
Cases > Test Value	105
Total Cases	210
Number of Runs	119
Z	1,798
Asymp. Sig. (2-tailed)	,072

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Sedangkan hasil uji *run-test* pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *asympt.sig.(2-tailed)* 0,072 > 0,05 yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi pada model linear yang diuji.

Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak Heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Apabila secara statistik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi terjadinya heterokedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
LnPAD	0,247	Tidak ada Heteroskedastisitas
LnDP	0,702	Tidak ada Heteroskedastisitas
LnM	0,128	Tidak ada Heteroskedastisitas

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Pada hasil uji *glejser* berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel PAD sebesar 0,247, variabel DP sebesar 0,702, variabel BM sebesar 0,128. Dari masing-masing variabel diperoleh nilai probabilitas signifikansi uji lebih besar dari nilai α (0,05). Dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas dalam model regresi.

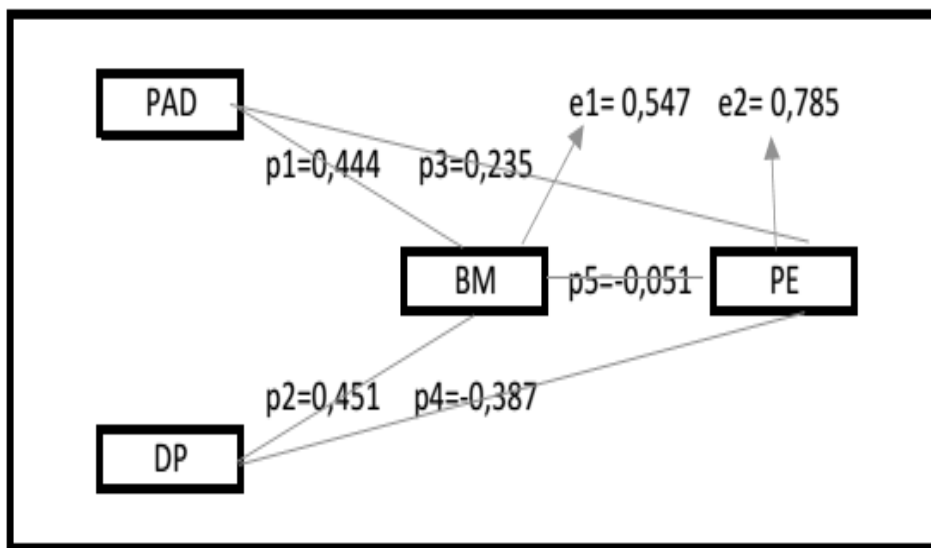
Model Analisis Jalur

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk mengetahui pengaruh diantara setiap variabelnya, apakah hubungan antara variabel tersebut terjadi secara langsung atau tidak, dan juga dapat membandingkan besar kecilnya pengaruh, baik yang langsung maupun yang tidak langsung dari masing-masing variabel (Ghozali, 2011). Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat dihasilkan nilai pada tabel 7 dan dibuat model diagram jalur seperti pada gambar 1.

Tabel 7. Koefisien Jalur

Regresi	Unstandardized Coefficients		Stand Coef. Beta	R2	Uji		Uji	
	Koef Reg.	Stand. Error			F	sig	T	sig
Struktur 1								
(Constant)	-0,531	1,583		0,701	243,196	0,000	-0,335	0,738
PAD » BM	0,346	0,45	0,444				7,741	0,000
DP » BM	0,644	0,82	0,451				7,866	0,000
Struktur 2								
(Constant)	3,866	0,491		0,383	42,698	0,000	7,878	0,000
PAD» PE	0,032	0,16	0,235				2,052	0,041
DP » PE	-0,097	0,29	-0,387				-3,367	0,001
BM » PE	-0,009	0,22	-0,051				-0,420	0,675

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti



Gambar 1. Diagram Jalur Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan model diagram jalur pada gambar 1. maka dihasilkan bentuk model struktural pada tabel 8 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8. Model Struktural *Analysis Path*

$$\text{Struktural 1: } \text{LnBM} = 0,444\text{LnPAD} + 0,451\text{LnDP} + e1$$

$$\text{Struktural 2: } \text{LnPE} = 0,235\text{LnPAD} - 0,387\text{LnDP} - 0,051 \text{LnBM} + e2$$

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Pada struktur 1, nilai koefisien pendapatan asli daerah sebesar 0,444 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal, apabila pendapatan asli daerah naik sebesar 1%, maka belanja modal akan naik sebesar 0,444%, nilai koefisien dana perimbangan sebesar 0,451 juga menunjukkan bahwa dana perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal yang berarti, apabila dana perimbangan naik sebesar 1%, maka belanja modal akan naik sebesar 0,451%, dan hal ini juga berlaku pada struktur 2. Setelah dihasilkan model strukturnya maka dapat diperoleh nilai pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antara variabel sebagaimana disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Koefisien Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total PAD dan DP terhadap PE melalui BM

Uraian	BM	PE
Pengaruh Langsung		
PAD	0,444	0,235
DP	0,451	-0,387
BM	-	-0,051
Pengaruh Tidak Langsung		
PAD	-	$0,444 \times -0,051 = -0,023$
DP	-	$0,451 \times -0,051 = -0,023$
BM	-	-
Pengaruh Total		
PAD	0,444	$0,235 - 0,023 = 0,212$
DP	0,451	$-0,387 - 0,023 = -0,410$
BM	-	-0,051

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui presentasi pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai R² dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R² berkisar antara 0 sampai 1.

Tabel 10. Uji R

Pengaruh Secara Simultan	R	R ²	Ajusted R ²	Standard Error
Struktur 1				
PAD, DP » BM	0,838	0,701	0,699	0,32401
Struktur 2				
PAD, DP, BM » PE	0,619	0,383	0,374	0,10042

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan statistik nilai koefisien determinasi (R²) tabel 10 diperoleh angka koefisien determinasi (R²) yaitu nilai R² pada struktur 1 sebesar sebesar 0,701 yang menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) terhadap variabel dependen (belanja modal) sebesar 0,701 sedangkan sisanya sebesar 0,299 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sedangkan nilai R² pada struktur 2 sebesar 0,383 yang menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) sebesar 0,383 sedangkan sisanya sebesar 0,617 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 11. Uji F

Pengaruh Secara Simultan	df1 = k-1	df2 = n-k	F _{hitung}	Sig.	F _{tabel}	Keterangan
Struktur 1						
PAD, DP » BM	2	207	243,196	0,000	3,0395	Signifikan
Struktur 2						
PAD, DP, BM » PE	3	206	42,698	0,000	2,6484	Signifikan

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai F_{hitung} pada struktur 1 sebesar 243,196. Nilai F_{tabel} dengan df1=(k-1)=2 dan df2=(n-k)=207 diperoleh

sebesar 3,0395. Dengan demikian, nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ ($243,196 \geq 3,0395$), yang berarti variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal). Sedangkan Nilai F_{hitung} pada struktur 2 sebesar 42,698. Nilai F_{tabel} dengan $df_1=(k-1)=3$ dan $df_2=(n-k)=206$ diperoleh sebesar 2,6484. Dengan demikian, nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ ($42,698 \geq 2,6484$), yang berarti variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).

Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Hasil perhitungan statistik dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$) disajikan nilai t_{hitung} dan *significant* pada tabel 12.

Tabel 12. Uji t

Pengaruh Secara Simultan	df1 = k-1	df2 = n-k	t_{hitung}	Sig.	t_{tabel}	Keterangan
Struktur 1						
PAD » BM	2	207	7,741	0,000	1,9715	Signifikan
DP » BM	2	207	7,866	0,000	1,9715	Signifikan
Struktur 2						
PAD» PE	3	206	2,052	0,041	1,9715	Signifikan
DP » PE	3	206	-3,367	0,001	-1,9715	Signifikan
BM » PE	3	206	-0,420	0,675	1,9715	Tidak Signifikan

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Berdasarkan tersebut diperoleh nilai t_{hitung} pada struktur 1 untuk pendapatan asli daerah sebesar 7,741 dan dana perimbangan sebesar 7,866. Nilai t_{hitung} dengan $df_2=(n-k)=207$ diperoleh sebesar 1,9715. Dengan demikian, nilai $t_{hitung} \geq$ nilai t_{tabel} ($7,741 \geq 1,9715$ dan $7,866 \geq 1,9715$), yang berarti variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (belanja modal). Sedangkan nilai t_{hitung} pada struktur 2, untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,052, dana perimbangan sebesar -3,367 dan belanja modal sebesar -0,420. Nilai t_{tabel} dengan $df=(n-k)=206$ diperoleh sebesar 1,9715. Dengan demikian, nilai $t_{hitung} \geq$ nilai t_{tabel} untuk pendapatan asli daerah ($2,052 \geq 1,9715$) dan dana perimbangan ($-3,367 \geq -1,9715$), sedangkan nilai $t_{hitung} \geq$ nilai t_{tabel} untuk belanja modal ($-0,420 \leq 1,9715$), artinya variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi), sedangkan variabel independen belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Signifikansi Pengaruh Tidak Langsung Z-Value dan Z (P-Value)

Hasil perhitungan *z-value* dan *z (p-value)* baik secara manual dengan rumus *sobel test statistic* dan fungsi *NORMSDIST* yang ada pada excel disajikan pada tabel 13.

Tabel 13. Pengaruh Tidak Langsung z-value dan z (p-value)

	z-value	z (p-value)
Pengaruh Tidak langsung PAD terhadap PE melalui BM	-0,2557	0,4107
Pengaruh Tidak Langsung DP terhadap PE melalui BM	-0,2136	0,4154

Sumber : Data SPSS diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 13 maka diperoleh nilai *z-value* dan *z(p-value)* pertama masing-masing sebesar -0,2557 dan 0,4107. Dengan demikian, nilai *z-value* = -0,2557 < -1,96 dan *z (p-value)* = 0,4107 > 0,05, yang berarti variabel independen (pendapatan asli daerah) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) melalui variabel intervening

(belanja modal) dan nilai perhitungan z -value dan $z(p$ -value) kedua masing-masing sebesar -0,2136 dan 0,4154. Dengan demikian, nilai z -value = -0,2136 < -1,96 dan $z(p$ -value) = 0,4154 > 0,05, yang berarti variable independen (dana perimbangan) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) melalui variabel intervening (belanja modal).

5.2. Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear yang dilakukan atas pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal diperoleh koefisien jalur sebesar 0,444 dengan nilai $t_{hitung}=7,7410 >$ nilai $t_{tabel}=1,9715$ dan tingkat signifikansi $=0,00 < \alpha=0,05$ menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja modal. Pendapatan asli daerah belum sepenuhnya dapat menutupi belanja modal. Namun demikian, kenaikan pendapatan asli daerah cenderung diikuti dengan kenaikan belanja modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan atas pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal diperoleh koefisien jalur sebesar 0,451 dengan nilai $t_{hitung}=7,8660 >$ nilai $t_{tabel}=1,9715$ dan tingkat signifikansi $=0,00 < \alpha=0,05$ menunjukkan bahwa dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkat Dana Perimbangan akan meningkatkan Belanja Modal. Dalam hal ini dana perimbangan pada dasarnya telah mampu menutupi belanja modal karena kenaikan dana perimbangan cenderung diikuti pula dengan kenaikan belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan atas pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh koefisien jalur sebesar 0,235 dengan nilai $t_{hitung}=2,052 >$ nilai $t_{tabel}=1,9715$ dan tingkat signifikansi $=0,041 < \alpha=0,05$ yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan asli daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya diukur dari jumlah pendapatan yang diterima, tetapi juga dari peran pemerintah dalam mengatur perekonomian masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan pendapatan asli daerah diikuti dengan kecenderungan pada penurunan pertumbuhan ekonomi, namun demikian pendapatan asli daerah belum merupakan sumber penerimaan yang dominan.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan atas pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh koefisien jalur sebesar -0,387 dengan nilai $t_{hitung}=-3,367 >$ nilai $t_{tabel}=-1,9715$ dan tingkat signifikansi $=0,001 < \alpha=0,05$ menunjukkan bahwa dana perimbangan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat dana perimbangan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan dana perimbangan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun porsi dana perimbangan cukup besar ditinjau dari total pendapatan kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi dana perimbangan belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagian besar dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat

kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur masih cenderung digunakan untuk mensejahterakan pegawai. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa dana perimbangan yang jumlahnya terus meningkat tetapi belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan atas pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga diperoleh koefisien jalur sebesar $-0,051$ dengan nilai $t_{hitung} = -0,420 <$ nilai $t_{tabel} = -1,9715$ dan tingkat signifikansi $= 0,675 > \alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat belanja modal akan menurunkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan belanja modal tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan atas pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal diperoleh koefisien jalur total sebesar $0,212$ (koefisien jalur langsung $= 0,235 +$ koefisien jalur tidak langsung $= -0,023$). Hasil dari perhitungan koefisien jalur total dari pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal menjadi menurun bila dibanding dengan koefisien jalur langsung pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (koefisien jalur langsung $= 0,235 >$ koefisien jalur total $= 0,212$). Hasil ini didukung dengan uji signifikansi pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dengan *sobel test statistic* diperoleh nilai $z\text{-value} = -0,2557 < -1,96$ dan $z(p\text{-value}) = 0,4107 > 0,05$, yang artinya pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan atas pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal diperoleh koefisien jalur total sebesar $-0,410$. (koefisien jalur langsung $= -0,387 +$ koefisien jalur tidak langsung $= -0,023$). Hasil perhitungan koefisien jalur total pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal menjadi meningkat bila dibanding dengan koefisien jalur langsung pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi (koefisien jalur langsung $= -0,387 <$ koefisien jalur total $= -0,410$). Walaupun koefisien jalur total dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi setelah melalui belanja modal semakin meningkat, tetapi mempunyai pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat dana perimbangan melalui belanja modal akan menurunkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan dana perimbangan melalui belanja modal tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini didukung dengan uji signifikansi pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dengan *sobel test statistic* diperoleh nilai $z\text{-value} = -0,2136 < -1,96$ dan $z(p\text{-value}) = 0,4154 > 0,05$, yang artinya dana perimbangan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

6. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah signifikan terhadap belanja modal. Peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh untuk mendorong peningkatan belanja modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur dalam periode 2010-2015. Dana Perimbangan signifikan terhadap belanja modal. Peningkatan dana perimbangan berpengaruh untuk mendorong peningkatan belanja modal pada kabupaten/ kota di Jawa Timur dalam periode tahun 2010-2015.

Pendapatan asli daerah signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan, walaupun persinya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan pada kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi pendapatan asli daerah telah sepenuhnya digunakan untuk kegiatan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh untuk mendorong peningkatan belanja modal pada kabupaten/ kota di Jawa Timur dalam periode tahun 2010-2015.

Dana perimbangan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan, walaupun porsi dana perimbangan cukup besar ditinjau dari total pendapatan kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi dana perimbangan belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi masih cenderung digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai sehingga peningkatan dana perimbangan tidak berpengaruh untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur dalam periode tahun 2010-2015.

Belanja modal tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan porsi belanja modal masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total belanja kabupaten/kota di Jawa Timur. Belanja daerah masih lebih dominan habis terserap pada alokasi belanja tidak langsung, seperti belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pendapatan asli daerah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien jalur pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi setelah melalui belanja modal semakin kecil bila dibandingkan dengan pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana perimbangan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien jalur, walaupun dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal meningkat bila dibandingkan dengan pengaruh langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tidak signifikan.

References

- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2016*. Surabaya: CV. Bima Media Mandiri.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Ferdian, Yuriko. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah." *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. Vol. 1 (2), 2013.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Iskandar, Maolana Amin. 2012. "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006-2010)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Universitas Indonesia*. Vol. 9 (2), 2012.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 5 (2), Desember 2010.

- Ngurah, I.P., dan Kartika, P. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 7 (1): hal. 79-92.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Puspitasari, Rosy dan Indrajaya, I.G.B. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 3 (9): hal. 420-427.
- Situs BPS Jawa Timur (<http://www.bps.jatim.co.id>)
- Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<http://www.djpk.depkeu.go.id>).
- Sukirno, Sadono. 1996. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.